

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Koordinator : Budi Santoso SE., MM.

I. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Mata Kuliah : Perpajakan
2. Bobot SKS : 3 SKS
3. Jenjang / Jurusan : D3 AKUNTANSI
4. Semester : 5
5. Kode : KK-024309

II. MATERI

Materi untuk mata kuliah Perpajakan terdiri dari:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. PPh Perseorangan
3. PPh Badan
----- mid-test-----
4. PPh Badan (Lanjutan)
5. PPN dan PPn BM
6. PBB
7. Bea Materai
8. UU No. 17, 18, 19, 20 dan 21 Tahun 1997.
9. Kuis dan Latihan Soal Ujian Negara.
----- fin-test-----

Tujuan Intruksional :

Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Perpajakan yang sangat penting bagi mahasiswa. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea dan Materai serta UU perpajakan baru lainnya.

Pustaka :

- (1) Neltje F.K., Hukum Pajak, Penerbit Gunadarma, Jakarta
- (2) Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- (3) Amin Wijaya Tunggal, Pokok-pokok Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka, Jakarta.
- (4) Undang-Undang Perpajakan 1994 dan Tahun 1997.
- (5) Peraturan Pemerintah (PP), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan dan SK Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak yang berlaku sampai saat ini.
- (6) UU No. 17, 18, 19, 20 dan 21 Tahun 1997.

III. RINCIAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN

**SATUAN ACARA PERKULIAHAN
UNIVERSITAS GUNADARMA**

MATA KULIAH	: PERPAJAKAN
FAKULTAS	: EKONOMI
JURUSAN/JENJANG	: D3/AKUNTANSI

M I N G G U	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TIK	S U M B E R
1 & 2	Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan dan Dasar Hukum Perpajakan. 2. Pengertian-Pengertian Wajib Pajak, Badan, Masa Pajak, Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak dan Surat Paksa. 3. Pengertian NPWP dan NPPKP 4. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Ketentuan Pembayaran Pajak. 5. Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 6. Surat Tagihan Pajak (STP) 7. Keberatan dan Banding. 8. Pemeriksaan dan Penyidikan. 9. KewajibanPembukuan / Pencatatan. 10. Sanksi-sanksi dalam perpajakan 	<p>Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui mengapa UU Perpajakan itu dari waktu ke waktu telah mengalami beberapa perubahan. 2. Mengetahui apa yang menjadi dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 3. Mengetahui pengertian Wajib Pajak, Badan, Masa Pajak, Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Kredit Pajak, Penanggung Pajak, Surat Pajak dan sebagainya. 4. Mengetahui bagaimana menentukan tahun pajak. 5. Mengetahui perbedaan tahun pajak dengan tahun takwim. 6. Mengetahui pengertian NPWP, Cara-cara mendapatkan NPWP maupun penghapusannya serta Fungsi dan Sanksi bagi NPWP. 7. Mengetahui apa yang dimaksud NPPKP dan manfaatnya. 8. Mengetahui fungsi Surat Setoran Pajak (SSP), batas pembayaran Pajak dan Cara penundaan pembayaran pajak. 	1 2 3 4 5

			<p>9. Mengetahui pengertian SPT, Fungsi SPT, Prosedur Penyelesaian SPT, Jenis SPT, Batas Waktu Penyampaian SPT, penundaan Penyampaian SPT dan Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT.</p> <p>10. Mengetahui apa saja jenis SKP (Surat Ketetapan Pajak.)</p> <p>11. Mengetahui Pengertian, alasan penerbitan, sanksi administrasi, fungsi dan jangka waktu penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN.</p> <p>12. Mengetahui Pengertian, alasan penerbitan, sanksi administrasi, fungsi dan jangka waktu penerbitan STP (Surat tagihan Pajak).</p> <p>13. Mengetahui tata cara penyelesaian keberatan dan penyelesaian banding.</p> <p>14. Mengetahui apa maksud, sasaran, tujuan, Prosedur pemeriksaan dan wewenang pemeriksa.</p> <p>15. Mengetahui apa maksud, sasaran, tujuan, Prosedur pemeriksaan dan wewenang Penyidik.</p> <p>16. Mengetahui Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.</p> <p>17. Mengetahui mengapa pembukuan diperlukan dan apa sanksinya bila tidak memenuhi kewajiban pembukuan.</p> <p>18. Mengetahui berbagai sanksi atas pelanggaran yang terjadi.</p>	
3 & 4	Pajak Penghasilan Perseorangan.	<p>1. Subyek, Obyek dan Tarif PPh pasal 21.</p> <p>2. Cara Menghitung dan Memperhitungkan PPh pasal 21.</p> <p>3. Subyek, Obyek, Dasar</p>	<p>Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat :</p> <p>1. Mengetahui penghasilan apa yang akan dikenai PPh pasal 21.</p> <p>2. Mengetahui siapa saja yang</p>	1 2 3 4 5

		<p>Pemungutan dan Tarif Pemungutan PPh pasal 22.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Subyek, Obyek, Dasar Pemungutan dan Tarif Pemotongan PPh pasal 23/26. 5. PPh pasal 24. 6. PPh pasal 25. 	<p>menjadi wajib pajak PPh pasal 21.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengetahui siapa yang tidak termasuk sebagai wajib PPh pasal 21. 4. Mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 21. 5. Mengetahui siapa yang termasuk dan mempunyai wewenang untuk memotong PPh pasal 21 dan Mengetahui apa hak pemotong PPh pasal 21. 6. Mengetahui apa kewajiban pemotong PPh pasal 21. 7. Mengetahui secara lebih detail penghasilan dari pekerjaan apa yang akan dikenai pemotongan PPh pasal 21. 8. Mengetahui siapa saja yang akan dikenai norma penghitungan. 9. Mengetahui penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek yang dikenai PPh pasal 21. 10. Mengetahui bagaimana cara menghitung dan ketentuan penghitungan PPh pasal 21 berikut contoh perhitungannya. 11. Mengetahui apa maksud pengenaan PPh pasal 22. 12. Mengetahui siapa yang menjadi pemungut PPh pasal 22. 13. Mengetahui obyek pemungutan dan subyek yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22. 14. Mengetahui siapa yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. 15. Mengetahui cara pemungutan, Dasar Pemungutan dan Tarif Pemungutan PPh pasal 22. 16. Mengetahui bagaimana cara 	
--	--	---	---	--

			<p>menghitung PPh pasal 22.</p> <p>17. Mengetahui apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23/26</p> <p>18. Mengetahui penghasilan apa saja yang dikenakan potongan PPh pasal 23/26</p> <p>19. Mengetahui siapa yang dikenakan potongan PPh pasal 23/26</p> <p>20. Mengetahui siapa yang diperbolehkan memotong/memungut PPh pasal 23/26</p> <p>21. Mengetahui apa yang tidak termasuk obyek pajak PPh pasal 23/26</p> <p>22. Mengetahui cara penghitungan PPh pasal 23/26</p> <p>23. Mengetahui pengertian PPh pasal 24.</p> <p>24. Mengetahui bagaimana penerapan <i>accrual basis</i> dan <i>cash basis</i> dalam penggabungan penghasilan.</p> <p>25. Mengetahui dan menghitung batas maksimum pajak yang bisa dikreditkan.</p> <p>26. Mengetahui dan menghitung batas maksimum pajak yang bisa dikreditkan bila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara.</p> <p>27. Mengetahui dan menghitung batas maksimum pajak yang bisa dikreditkan bila menderita kerugian di luar negeri.</p> <p>28. Mengetahui cara melaksanakan kredit pajak luar negeri beserta lampiran yang diperlukan.</p> <p>29. Mengetahui dan memahami bagaimana rumus untuk menghitung PPh pasal 25</p> <p>30. Mengetahui cara menghitung PPh pasal 25.</p>	
--	--	--	--	--

5 & 6	Pajak & Penghasilan (PPh) Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukuan dan Pencatatan 2. Penyusutan dan Amortisasi 3. Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 31. Mengetahui bagaimana penerapan PPh pasal 25 untuk jenis usaha Bank, Lembaga Keuangan, BUMN dan BUMD. 32. Mengetahui cara menghitung PPh pasal 29, termasuk kredit pajaknya. <p>Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui mengapa harus penyelenggaraan pembukuan. 2. Mengetahui syarat tidak penyelenggaraan pembukuan. 3. Mengetahui bagaimana menerapkan norma penghitungan. 4. Mengetahui perbedaan depresiasi, amortisasi dan delesi. 5. Mengetahui metode penyusutan yang diijinkan oleh Dirjen Pajak. 6. Mengetahui bagaimana cara menghitung penyusutan. 7. Mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan dan kerugian bila aktiva harus dijual atau terjadi sesuatu musibah. 8. Melakukan koreksi, baik koreksi fiskal positif maupun negatif. 	1 2 3 4 5
7	Pajak Penghasilan (PPh) Badan - Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Komersial 2. Koreksi Fiskal tentang Laporan Keuangan Komersial 3. Laporan Keuangan Fiskal 	<p>Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan untuk perpajakan. 2. Mengetahui apa yang merupakan biaya atau bukan biaya menurut perpajakan. 3. Mengetahui apa yang merupakan pendapatan atau 	1 2 3 4 5

			<p>bukan pendapatan menurut perpajakan.</p> <p>4. Mengetahui bagaimana cara melakukan koreksi fiskal dan mengetahui apa alsannya.</p> <p>5. Mengetahui bagaimana cara membuat laporan untuk pajak.</p>	
8 & 9	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian PPN dan PPn atas BM 2. Cara Menghitung PPN dan Cara Kerja Sistem PPN 3. Berbagai Pengertian Istilah, Obyek PPN dan Tarif PPN 4. Penyerahan Barang Kena Pajak di luar Daerah Pabean 5. Penyerahan Barang yang Dikenakan PPn atas BM 6. Dasar Pengenaan Pajak dan Badan-badan Pemungut PPN dan PPn atas BM 7. PPN dan PPn atas BM yang dipungut oleh Kantor Bendaharawan Negara. 8. PPN Ditanggung Pemerintah dan Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan 9. Saat dan tempat Pajak Terutang 10. Pengukuhan dan Pencatatan 11. Penyetoran dan Kredit Pajak 12. Faktur Pajak dan SPT Masa 13. Tenggang Waktu Antara Saat Pajak Terutang dan saat Pembayaran Pajak. 	<p>Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa bisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan menjelaskan Pengertian PPN 2. Mengetahui dan menjelaskan Pengertian PPn atas BM 3. Mengetahui bagaimana Cara Menghitung PPN 4. Mengetahui bagaimana Cara Kerja Sistem PPN 5. Menjelaskan Berbagai Pengertian Istilah 6. Mengetahui Obyek PPN dan Tarif PPN 7. Mengetahui Penyerahan Barang Kena Pajak di luar Daerah Pabean 8. Mengetahui Penyerahan Barang yang Dikenakan PPn atas BM 9. Mengetahui Dasar Pengenaan Pajak 10. Mengetahui apa yang disebut PPn atas BM 11. Mengetahui Badan-badan Pemungut PPN & PPn atas BM 12. Mengetahui PPN dan PPn atas BM yang dipungut oleh Kantor Bendaharawan Negara. 13. Mengetahui PPN Ditanggung Pemerintah 14. Mengetahui Saat dan tempat Pajak Terutang 15. Mengetahui Pengukuhan dan Pencatatan 16. Mengetahui Penyetoran dan Kredit Pajak 17. Mengetahui Pajak Masukan 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>

		14. Peraturan Peralihan dan Akuntansi PPN	<p>yang Tidak Dapat Dikreditkan</p> <p>18. Mengetahui Faktur Pajak dan SPT Masa</p> <p>19. Mengetahui Tenggang Waktu Antara Saat Pajak Terutang dan saat Pembayaran Pajak.</p> <p>20. Mengetahui Peraturan Peralihan</p> <p>21. Mengetahui Akuntansi PPN</p>	
10	PBB	<p>1. Pengertian PBB</p> <p>2. Obyek, Subyek dan Tarif PBB.</p> <p>3. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB.</p> <p>4. Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang menentukan Pajak Terutang</p> <p>5. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)</p> <p>6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)</p> <p>7. Tata Pembayaran dan Penagihan</p> <p>8. Keberatan dan Banding</p> <p>9. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak.</p> <p>10. Pengurangan PBB dan Pengurangan Denda Administrasi</p> <p>11. Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.</p>	<p>Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa bisa :</p> <p>1. Mengetahui Dasar Hukum, Asas dan Pengertian PBB</p> <p>2. Mengetahui Obyek, Subyek dan Tarif PBB.</p> <p>3. Mengetahui Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak</p> <p>4. Mengetahui Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang menentukan Pajak Terutang</p> <p>5. Mengetahui apa yang dimaksud Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)</p> <p>6. Mengetahui apa yang dimaksud Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).</p> <p>7. Mengetahui bagaimana sistem pengenaan PBB dan bagaimana SPOP, SPPT dan SKPKB dikeluarkan.</p> <p>8. Mengetahui Tata Pembayaran dan Penagihan SPPT.</p> <p>9. Mengetahui Tata Pembayaran Berdasarkan SKP.</p> <p>10. Mengetahui Tata Pembayaran Tidak/Kurang Dibayar pada saat jatuh tempo.</p> <p>11. Mengetahui Tata Pembayaran Berdasarkan STP.</p> <p>12. Mengetahui Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding</p> <p>13. Mengetahui Prosedur</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>

			Pengajuan Pengurangan PBB. 14. Pengurangan Denda Administrasi 15. Mengetahui Pengenaan Sanksi bagi Wajib Pajak 16. Mengetahui Pengenaan Sanksi Umum & Khusus bagi Pejabat. 17. Mengetahui Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.	
11	Bea Materai	1. Pengertian Bea Materai dan Prinsip Umum Pengenaan Bea Materai. 2. Tarif Bea Materai dan Yang Tidak Dikenakan Bea Materai. 3. Saat terutang dan Pihak yang terutang Bea Materai. 4. Cara Pelunasan dan Cara Penggunaan Bea Materai 5. Sanksi dan Daluwarsa 6. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa bisa : 1. Menjelaskan Pengertian Bea Materai 2. Mengetahui Prinsip Umum Pengenaan Bea Materai. 3. Mengetahui Tarif Bea Materai. 4. Mengetahui siapa pihak yang terutang Bea Materai. 5. Mengetahui yang tidak Dikenakan Bea Materai 6. Mengetahui Bagaimana Cara Pelunasan. 7. Mengetahui Penggunaan Materai tempel dan Kertas Materai. 8. Mengetahui Sanksi administrasi dan pidana dalam Bea Materai. 9. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Daluwarsa 10. Mengetahui Ketentuan Peralihan dan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	2 3 4 5
12	UU No. 17, 18, 19, 20 dan 21 Tahun 1997.	1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Cukup Diinformasikan). 3. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) 4. Penerimaan Negara	Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat : 1. Mengetahui Bagaimana Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan BPSP (UU No. 17. Th. 1997). 2. Mengetahui Kududukan dan Tempat BPSP. 3. Mengetahui Susunan Keanggotaan BPSP. 4. Mengetahui Persyaratan dan	5

		<p>Bukan Pajak (Cukup Diinformasikan).</p> <p>5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</p>	<p>segala ketentuan untuk menjadi anggota BPSP.</p> <p>5. Mengetahui Tugas dan Wewenang BPSP.</p> <p>6. Mengetahui Bagaimana syarat mengajukan Banding dan mengajukan Gugatan ke BPSP.</p> <p>7. Mengetahui Sifat dan Macam Putusan BPSP.</p> <p>8. Mengetahui latar Belakang terbitnya UU No. 19. Th. 1997 mengenai PPSP.</p> <p>9. Mengetahui Dasar Hukum Penagihan Pajak dan Ruang Lingkup Penagiah Pajak.</p> <p>10. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Surat Paksa.</p> <p>11. Mengetahui apa yang dimaksud Juru Sita termasuk Tugas dan Wewenangnya.</p> <p>12. Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Penagihan Pajak.</p> <p>13. Mengetahui prosedur pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan..</p> <p>14. Mengetahui Konsep yang melandasi UU No. 21. Th. 1997 (BPHTB)</p> <p>15. Mengetahui Implementasi dan aspek Hukum BPHTB.</p> <p>16. Mengetahui Obyek dan Subyek BPHTB.</p> <p>17. Mengetahui bagaimana cara menghitung BPHTB.</p> <p>18. Mengetahui saat terutangnya BPHTB.</p> <p>19. Mengetahui Dasar Penagihan BPHTB, seperti SKBKB, SKBKBT, STB sampai Pengajuan Keberatan dan Banding (<i>Cat. : B = BPHTB</i>).</p>	
13	Kuis.	Soal Ujian Lokal dan Ujian Negara.		